

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(GERINDRA)  
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
I. Daftar Isi	i
II. Surat Pernyataan Pengurus Partai	ii
III. Laporan Auditor Independen	iii
IV. Laporan Posisi Keuangan Partai Gerindra Per 31 Desember 2018 dan 2017	1
V. Laporan Aktivitas Partai Gerindra untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	2
VI. Laporan Arus Kas Partai Gerindra untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.	3
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Gerindra untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.	4 - 20



# DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

## SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto  
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54  
Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan  
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, MA  
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54  
Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan  
Jabatan : Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 November 2020

Thomas A. M Djiwandono, MA  
Bendahara Umum



Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto  
Ketua Umum

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00141/2.999/AU.1/11/0138-3/1/XI/2020

**Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  
(Organisasi Nirlaba)**

Kami telah mengaudit posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Pusat tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.



**Basis untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian**

Laporan keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Pusat belum merupakan laporan konsolidasian Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 676 Tahun 2003 tentang tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta laporan dana kampanye peserta pemilihan umum didalam Bab.I-Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) dan (7) menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus partai politik di tingkat Propinsi yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan partai politik pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah.

**Opini**

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak hal dijelaskan dalam paragraf Basis untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Pusat tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas, dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kantor Akuntan Publik  
DJOKO, SIDIK & INDRA



Drs. Abubakar Sidik, MS, CPA, CA  
NRAP AP. 0138

Jakarta, 25 November 2020

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**  
**31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
 ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

<u>ASET</u>			
	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ASET</b>			
Kas dan bank	2b,3	3.667.077.113	3.756.771.563
Piutang lain-lain		19.800.000	12.700.000
Biaya dibayar dimuka	2c,4	40.669.200	55.293.100
<b>Aset Terikat Untuk Investasi :</b>	2d,5		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 2.822.742.546 tahun 2018 dan Rp.2.397.618.246 tahun 2017		645.962.454	924.511.354
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>4.373.508.767</u>	<u>4.749.276.017</u>
<b><u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u></b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Biaya yang masih harus dibayar		93.500.000	55.000.000
Hutang lain-lain	6	166.559.900	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<u>260.059.900</u>	<u>55.000.000</u>
<b>ASET NETO</b>	2g		
Tidak Terikat		4.113.448.867	4.694.276.017
Terikat Temporer		-	-
<b>Jumlah Aset Neto</b>		<u>4.113.448.867</u>	<u>4.694.276.017</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<u>4.373.508.767</u>	<u>4.749.276.017</u>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

**(ORGANISASI NIRLABA)**

**LAPORAN AKTIVITAS**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

	<i>Catatan</i>	2018		2017	
		Tidak Terikat	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Temporer
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>					
<b>Penerimaan</b>					
Kas Negara melalui APBN	2e,7	14.750.043.000	-	1.593.004.644	-
Iuran anggota Fraksi Gerindra DPR RI	2e,8	12.067.500.000	-	10.946.500.000	-
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2e,9	18.967.166.850	-	32.692.777.000	-
Sumbangan pihak ketiga	2e,10	6.193.062.500	-	6.000.000	-
Sumbangan perorangan	2e,11	100.000	-	-	-
Sumbangan Pengurus	2e,12	1.420.000	-	4.900.000	-
Lain-lain	2e,13	47.307.253	-	1.094.672.114	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>52.026.599.603</b>	<b>-</b>	<b>46.337.853.758</b>	<b>-</b>
<b>Pengeluaran</b>					
Beban penerimaan kas melalui APBN	2e,14	14.750.043.000	-	1.593.284.112	-
Beban kegiatan DPP	2e,15	1.000.000.000	-	773.000.000	-
Beban program bidang	2e,16	5.776.588	-	3.437.800.000	-
Beban kegiatan sayap Partai	2e,17	376.381.300	-	262.601.000	-
Beban Kampanye	2e,18	1.389.942.500	-	-	-
Beban bakti sosial	2e,19	105.500.000	-	90.683.351	-
Beban publikasi dan kehumasan	2e,20	3.452.312.800	-	575.920.000	-
Beban umum dan administrasi	2e,21	31.401.353.109	-	40.916.263.926	-
Beban lain-lain	2e,22	126.117.456	-	18.345.809	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>52.607.426.753</b>	<b>-</b>	<b>47.667.898.198</b>	<b>-</b>
<b>PENURUNAN ASET NETO</b>		<b>(580.827.150)</b>	<b>-</b>	<b>(1.330.044.440)</b>	<b>-</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<b>4.694.276.017</b>	<b>-</b>	<b>6.024.320.457</b>	<b>-</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>		<b>4.113.448.867</b>	<b>-</b>	<b>4.694.276.017</b>	<b>-</b>

*Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)

**LAPORAN ARUS KAS**

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

	<i>Catatan</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Penerimaan (Pengeluaran) Kas Dari :</b>			
Kas Negara melalui APBN	<i>2e, 7</i>	14.750.043.000	1.593.004.644
Iuran anggota DPR RI	<i>2e, 8</i>	12.067.500.000	10.946.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	<i>2e, 9</i>	18.967.166.850	32.692.777.000
Sumbangan pihak ketiga	<i>2e, 10</i>	6.193.062.500	6.000.000
Sumbangan perorangan	<i>2e, 11</i>	100.000	-
Sumbangan pengurus	<i>2e, 12</i>	1.420.000	4.900.000
Penerimaan lain-lain	<i>2e, 13</i>	47.307.253	1.094.672.114
<b>Jumlah</b>		<u>52.026.599.603</u>	<u>46.337.853.758</u>
<b>Pengeluaran kas untuk :</b>			
Beban kegiatan Partai		(52.056.184.997)	(47.216.938.572)
Piutang lain-lain		(7.100.000)	25.300.000
Biaya dibayar dimuka	<i>2c, 4</i>	14.623.900	(45.293.100)
Pajak dibayar dimuka		-	62.100.000
Biaya yang masih harus dibayar		38.500.000	(16.500.000)
Hutang lain-lain		166.559.900	(1.038.128.540)
Beban lain-lain		(126.117.456)	(18.345.809)
<b>Jumlah</b>		<u>(51.969.718.653)</u>	<u>(48.247.806.021)</u>
<b>Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi</b>		<u>56.880.950</u>	<u>(1.909.952.263)</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pembelian aset tetap	<i>2d, 5</i>	<u>(146.575.400)</u>	<u>(123.520.000)</u>
<b>Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>		<u>(146.575.400)</u>	<u>(32.500.000)</u>
<b>PENURUNAN NETO KAS DAN BANK</b>		(89.694.450)	(1.942.452.263)
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<u>3.756.771.563</u>	<u>5.699.223.826</u>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN</b>		<u>3.667.077.113</u>	<u>3.756.771.563</u>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

---

**1. UMUM**

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 20 Oktober 2014 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris mengenai Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Perubahan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015.

**Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisian kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
20. Mejalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

**(ORGANISASI NIRLABA)**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

### **1. UMUM - lanjutan**

21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sejumlah 33 (Tiga puluh tiga) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sejumlah 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

#### **Tujuan pembentuk organisasi adalah :**

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 20 Oktober 2014 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	:	Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Ketua Harian	:	Laksdya TNI (Purn) Moekhlis Sidik, MPA
Wakil Ketua Harian	:	Widjono Hardjanto, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri,	:	Fadli Zon.SS,M.Sc
Ketua Bidang Kajian Sistem Demokrasi	:	Drs. H. Syahrani Mataja, MM., MBA
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik	:	Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
Ketua Bidang Kajian Pemilu	:	Prof Dr Syamsul Bahri
Ketua Bidang Kerjasama Antar Partai Politik	:	Dhohir Farisi
Ketua Bidang Kerjasama Penyelenggara Pemilu	:	Abdul Harris Bobihoe

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

**(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**1. UMUM - lanjutan**

Ketua Bidang Pemerintahan Umum	:	Dr. H. Azikin Solthan, M.Sc
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintahan	:	Rindoko Dahono Wingit
Ketua Bidang Otonomi Daerah	:	Ir. Endro Hermono, MBA
Ketua Bidang Pembangunan Daerah	:	H. Subarna, SE., M.Si
Ketua Bidang Kependudukan	:	Dr. H.A Rasyid Saleh, M.Si
Ketua Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	:	Drs. M. Solihat
Ketua Bidang Pembangunan Desa	:	H. Bambang Riyanto, SH., MH., M.Si
Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	:	H Dairul, SE., M.Si
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	:	Mayjen TNI (Purn) Yudi Magio Yusuf
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	:	Irawan Ronodipuro
Ketua Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional	:	Irmawaty Habie SH
Ketua Bidang Kajian Kerjasama Luar Negeri	:	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian &	:	Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Nusyirwan
Ketua Bidang Pertahanan Darat	:	Kolonel TNI (Purn) Iswandi Anas, M.Si
Ketua Bidang Pertahanan Laut	:	Kolonel TNI (Purn) Sutandyo Sudarsono
Ketua Bidang Pertahanan Udara	:	Marsda TNI (Purn) Suwitno Adi, SIP
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	:	Mayjen TNI (Purn) Soenarko
Ketua Bidang Keamanan Nasional	:	Kombes (Pol) Alfons Loemau
Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/POLRI	:	Drs. Wenny Warouw
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	:	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber	:	Dr. Sumarjati Arjoso
Ketua Bidang Agama Islam	:	Habib Mahdi Alatas
Ketua Bidang Agama Kristen	:	Eliezer H. Hardjo
Ketua Bidang Agama Katolik	:	Haposan Paulus Batubara, SH
Ketua Bidang Agama Budha	:	Gouw Tjeng Sun
Ketua Bidang Agama Hindu	:	Ranjit S. Randhawa
Ketua Bidang Agama Konghucu	:	Sanjaya Sutandar
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	:	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si
Ketua Bidang Riset dan Teknologi	:	Heirma S.Poernomo
Ketua Bidang Teknologi Terapan	:	Fadli Tri Hartono, S.Si
Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Tekno	:	Ivan Venri Latif
Ketua Bidang Kesehatan	:	dr. Benyamin Paulus Oktavianus. Sp.P
Ketua Bidang Perbaikan Gizi Masyarakat	:	Bondan Haryo Winarno
Ketua Bidang Keluarga Berencana	:	dr. Batara Sirait, Sp.Og
Ketua Bidang Sosial	:	Yetti Wulandari
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	A.S.Kobalen,SE., MBA.,M.Phil
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan I	:	Anita Ariyani
Ketua Bidang Advokasi Perempuan	:	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Ketua Bidang Perlindungan Anak	:	dr. Karlina, MARS
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan I	:	Retno Sari Widowati
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	:	H. Anda, SE., MM
Ketua Bidang Kesenian dan Film Nasional	:	Jamal Mirdad
Ketua Bidang Budaya Nasional	:	Helmi Adam, S.Sos., S.Pd
Ketua Bidang Penanggulangan Penyalahgunaan	:	Sabam Rajagukguk

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

**(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**1. UMUM - lanjutan**

Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan :	Fx. Arief Poyuono, SE
Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan :	Roberth Rouw
Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan :	Ir. Iwan Sumule
Ketua Bidang Pengawasan Buruh dan Ketenagakerjaan :	Idin Rosidin
Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja :	Hairudin, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Keuangan dan :	Murphy Hutagalung, MBA
Ketua Bidang Perdagangan :	Heri Gunawan
Ketua Bidang BUMN :	H. Nurzahedy Tanjung, SE
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal :	Budisatrio Djiwandono
Ketua Bidang Penerimaan Negara :	Ramson Siagian
Ketua Bidang Keuangan :	Haerul Saleh, SH
Ketua Bidang Perbankan :	Drs. H. Mulyadi, MMA
Ketua Bidang Perindustrian :	Mohamad Hekal, MBA
Ketua Bidang Ekspor dan Impor :	Khilmi
Ketua Bidang Kajian Ekonomi Internasional :	Eric Alexander Sugandi
Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan, :	Edhy Prabowo, MM., MBA
Ketua Bidang Perencanaan, Pengawasan dan :	Ir. Sumail Abdullah
Ketua Bidang Tata Ruang Wilayah :	Budi Tjahjono Prawiro
Ketua Bidang Pertanahan :	H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE
Ketua Bidang Perumahan Rakyat :	H. Moh. Nizar Zahro, SH
Ketua Bidang Pekerjaan Umum :	Sudarsono, ST
Ketua Bidang Perhubungan :	Arion Hutagalung
Ketua Bidang Pertanian :	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
Ketua Bidang Peternakan :	drh. Muchlido Apriliast
Ketua Bidang Kehutanan :	Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, MM
Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan :	Ir. Suminta Ismail
Ketua Bidang Perdagangan Agro Internasional :	Dr. Ir. Sunggul Sinaga
Ketua Bidang Pertambangan :	Meireza Endipat Wijaya, ST
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan :	Dr. Ir. Kardaya Warnika, DEA
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan :	Ir. H. Harry Poernomo
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Konservasi En :	Dian Nugroho, ST
Ketua Bidang Pariwisata :	drg. Putih Sari
Ketua Bidang Transmigrasi :	Eddy DJ. Wibowo, SH
Ketua Bidang Lingkungan Hidup :	Benny Gusman Sinaga, ST
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan :	Waskita Rini
Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah :	Fary Djemy Francis
Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi, UMKM dan E :	Marwah Daud Ibrahim, Ph.D
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM :	Syukrianto Yulia, M.Fin
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan :	Feryzal Adam, SE., MM
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif :	Jasmin B Setiawan
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggot :	Widjono Hardjanto, SH
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan :	Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Org :	Rohmat Marzuki
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi :	Sudewa, ST., MT
Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organi :	Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

**1. UMUM - *lanjutan***

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar L :	Abdul Rahman
Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai :	Fauka Noor Farid
Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa :	Ferry Joko Yuliantono, SE., AK., M.Si
Ketua Bidang Pemetaan Potensi Basis Pemilih :	Setyoko, ST
Ketua Bidang Penggalangan Massa :	Didik Hariyanto
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat :	M. Asrian Mirza
Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi :	Rahmawati Soekarno Putri
Ketua Bidang Pengkajian Ideologi :	Eko Suryo Santjojo, B.B.A, SH., MH
Ketua Bidang Pembinaan Ideologi :	Ir. Ristiyanto
Ketua Bidang Pengamalan Ideologi :	Bambang Suroso, SH., MH
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi :	Dr. H. Sareh Wiyono, SH., MH
Ketua Bidang Ideologi Pancasila :	J. Priyo Harmono, SE., MH, M.Sc
Ketua Bidang Wawasan Nusantara :	Priscilla E Mantiri
Ketua Bidang Manifesto Perjuangan Partai :	Kolonel TNI (Purn) Suhary Z.B
Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi :	Sugiono
Ketua Bidang Kaderisasi :	Eko Wibowo
Ketua Bidang Sekolah Kader :	Kharisma Febriansyah
Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Poten :	Benny Pangbin
Ketua Bidang Penguatan aJaringan Kader :	Hj. Novita Wijayanti, SE., MM
Ketua Bidang Informasi Strategis :	Danang Wicaksana Sulistya
Ketua Bidang Komunikasi :	Ondy Saputra
Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik :	Dirgayuza Setyawan
Ketua Bidang Pengelolaan Database Partai :	Moh Arif Widarto
Ketua Bidang Upacara dan Tradisi Partai :	Chusni Mubarak
Ketua Bidang Logistik Partai :	Adnani Taufiq, S.Sos
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi :	Ir. Sufmi Dasko Ahmad, SH.,MH
Ketua Bidang Kajian Hukum :	Johan J. Lewerissa, SH., MH
Ketua Bidang Hak Asasi Manusia :	Hj. Mestariy Habie, SH
Ketua Bidang Advokasi :	Habiburokhman, SH
Ketua Bidang Hukum Perdagangan :	Maralda Hernanda Kairupan, SH., LLM., MCIArb
Ketua Bidang Hukum Konstitusi :	Dr. Hj. Elza Syarief, SH., MH
Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa :	Andi Seto Gadysta Asapa, SH., LLM
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga :	Purnomo
Ketua Bidang Kepemudaan :	Ikhwan Amirudin, SE., MM
Ketua Bidang Olahraga :	Abdul Karim Aljufri
Sekretaris Jenderal :	H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum :	Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

**Visi :**

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**1. UMUM - lanjutan**

**Misi :**

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat di setiap tingkat pemerintahan.

**Fungsi dan Tugas**

**Fungsi :**

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Tugas :**

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Partai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

**b. Kas dan bank**

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

**c. Biaya dibayar dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

**d. Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Kendaraan	8	12,5
Peralatan kantor	4	25
Perlengkapan kantor	4	25

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

**e. Aset Neto**

Aset bersih digolongkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen, tergantung ada tidaknya pembatasan. Partai menyajikan hibah atau wakaf berupa kas dan aset lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah berlalu, yaitu pada saat pembatasan masa telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

2. **KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan**

Sumber-sumber Keuangan Partai terdiri atas :

- Iuran wajib Anggota Partai
- Iuran sukarela Anggota Partai
- Iuran Pengurus Partai
- Sumbangan perorangan Anggota Partai
- Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan, adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Daerah (APBN/APBD).

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

f. **Perpajakan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

g. **Perubahan Aset Neto**

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu :

- **Pembatasan Permanen**

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- **Pembatasan Temporer**

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhi keadaan tertentu.

- **Sumbangan Terikat**

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

- **Sumbangan Tidak Terikat**

Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**3. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kas	415.638.747	447.174.717
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-664-9217)	3.013.999.255	2.126.127.512
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-488-6712)	128.517.914	1.136.532.321
PT Bank Central Asia Tbk. (a/c 2063-00-5959)	56.013.283	438.162
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(a/c 02-0601-003-052-303)	18.204.554	11.482.989
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-621-8328)	15.306.029	18.444.043
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-002-6263)	15.231.331	12.405.819
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-695-5291)	4.166.000	4.166.000
<b>Jumlah</b>	<u><u>3.667.077.113</u></u>	<u><u>3.756.771.563</u></u>

**4. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Perbaikan gedung DPP Gerindra	40.669.200	55.293.100
<b>Jumlah</b>	<u><u>40.669.200</u></u>	<u><u>55.293.100</u></u>

**5. ASET TETAP**

Terdiri dari :

	<b>31 Desember 2018</b>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Mutasi/Reklasifikasi</u>		<u>Saldo Akhir</u>
		<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	
<b>Harga perolehan :</b>				
Kendaraan bermotor	2.752.950.000	-	-	2.752.950.000
Peralatan kantor	417.263.000	132.497.400	-	549.760.400
Perlengkapan kantor	151.916.600	14.078.000	-	165.994.600
<b>Jumlah</b>	<u>3.322.129.600</u>	<u>146.575.400</u>	<u>-</u>	<u>3.468.705.000</u>
<b>Akumulasi penyusutan :</b>				
Kendaraan bermotor	1.958.011.979	344.118.750	-	2.302.130.729
Peralatan kantor	302.689.667	73.199.300	-	375.888.967
Perlengkapan kantor	136.916.600	7.806.250	-	144.722.850
<b>Jumlah</b>	<u>2.397.618.246</u>	<u>425.124.300</u>	<u>-</u>	<u>2.822.742.546</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u>924.511.354</u>			<u>645.962.454</u>

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

**(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

**5. ASET TETAP - lanjutan**

	<b>31 Desember 2017</b>			<b>Saldo Akhir</b>
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Mutasi/Reklasifikasi</b>		
		<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	
<b>Harga perolehan :</b>				
Kendaraan bermotor	2.752.950.000	-		2.752.950.000
Peralatan kantor	402.763.000	14.500.000		417.263.000
Perlengkapan kantor	133.916.600	18.000.000	-	151.916.600
<b>Jumlah</b>	<b>3.289.629.600</b>	<b>32.500.000</b>	<b>-</b>	<b>3.322.129.600</b>
<b>Akumulasi penyusutan :</b>				
Kendaraan bermotor	1.613.893.229	344.118.750		1.958.011.979
Peralatan kantor	242.672.000	60.017.667		302.689.667
Perlengkapan kantor	130.439.200	6.477.400	-	136.916.600
<b>Jumlah</b>	<b>1.987.004.429</b>	<b>410.613.817</b>	<b>-</b>	<b>2.397.618.246</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>1.302.625.171</b>			<b>924.511.354</b>

Biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan perubahan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 425.124.300 dan Rp. 410.613.817.

**6. HUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan hutang Partai atas pengurusan perpanjangan STNK mobil ambulance dari Perwakilan daerah-daerah seluruh Indonesia. Beban pengurusan STNK ini di talangi dahulu oleh daerah, selanjutnya akan ditagihkan ke Dewan Perwakilan Pusat. Dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 166.559.900.

**7. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN**

Akun ini terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pemilu 2014/2019	14.750.043.000	1.593.004.644
<b>Jumlah</b>	<b>14.750.043.000</b>	<b>1.593.004.644</b>

**Pemilu 2014/2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213-2664 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, nilai Bantuan Partai Politik untuk DPP Partai Gerindra tahun 2018 sebesar Rp. 14.750.043.000. Bantuan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diterima sebanyak 14.750.043 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga) suara dengan nilai satu suara sebesar Rp. 1.000 jadi ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2017 kepada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp. 1.593.004.644. Bantuan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diterima sebanyak 14.750.043 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga) suara dengan nilai satu suara sebesar Rp. 108.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
 ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**7. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN - lanjutan**  
 Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

**1. Pendidikan Politik**

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

**2. Operasional Sekretariat**

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :

- a. Adiministrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

**8. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI**  
 Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Iuran anggota periode 2014/2019	12.067.500.000	10.946.500.000
<b>Jumlah</b>	<u>12.067.500.000</u>	<u>10.946.500.000</u>

**Iuran anggota periode 2014/2019**

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2014/2019, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 73 kursi atau sekitar 13,04% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 12.067.500.000 dan tahun 2017 sebesar Rp. 10.946.500.000 dari 73 orang anggota. Penerimaan iuran anggota ini diterima secara tunai.

**9. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Iuran anggota periode 2014/2019	18.967.166.850	32.692.777.000
<b>Jumlah</b>	<u>18.967.166.850</u>	<u>32.692.777.000</u>

Akun ini merupakan iuran wajib anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) tingkat Provinsi dan Kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Bab X Pasal 59, yaitu iuran bulanan DPR dan DPRD sebesar 25% dari gaji dan tunjangan.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

**9. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA - lanjutan**

Iuran anggota DPRD per bulan, untuk Dewan Perwakilan Daerah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Dewan Perwakilan Cabang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per anggota. Atas iuran ini dipotong Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per anggota untuk Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) dan sisa iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Perwakilan Pusat (DPP).  
*Lihat catatan 23*

Pada tahun 2018 atas iuran ini tidak lagi dipotong untuk Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN). *Lihat catatan 21*

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima masing-masing sebesar Rp. 18.967.166.850 dan Rp. 32.692.777.000 dari Dewan Perwakilan Daerah sebesar 235 anggota dan Dewan Perwakilan Cabang sebesar 1.843 anggota. Penerimaan iuran anggota ini diterima secara tunai.

**10. SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Akun ini merupakan sumbangan dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PT Arsari Pratama	6.178.062.500	-
Gema Sadhana	<u>15.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
<b>Jumlah</b>	<u><u>6.193.062.500</u></u>	<u><u>6.000.000</u></u>

**PT Arsari Pratama**

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Arsari Pratama dan dana ini digunakan untuk kegiatan operasional Partai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran dan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

**11. SUMBANGAN PERORANGAN**

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari perorangan yang digunakan untuk biaya operasional Partai, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000 dan tahun 2017 nihil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**12. SUMBANGAN PENGURUS**

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari Pengurus Partai yang digunakan untuk biaya operasional Partai, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.420.000 dan Rp. 1.900.000.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
 ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**13. PENERIMAAN LAIN-LAIN**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Jasagiro	45.696.071	50.473.574
Lain-lain	<u>1.611.182</u>	<u>1.044.198.540</u>
<b>Jumlah</b>	<u><u>47.307.253</u></u>	<u><u>1.094.672.114</u></u>

**14. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pendidikan Partai Politik	13.692.873.750	1.169.200.000
Listrik dan telepon	552.057.409	324.425.493
Beban transportasi dan perjalanan dinas	194.424.671	8.746.400
Beban rapat internal Pengurus	104.751.635	33.504.768
Alat tulis kantor	85.444.701	21.932.000
Pengadaan inventaris kantor	63.631.600	-
Beban rumah tangga	35.179.000	25.097.000
Beban pemeliharaan data dan arsip	16.563.234	9.501.926
Media cetak dan elektronik	3.090.000	-
Jasa pos dan giro	<u>2.027.000</u>	<u>876.525</u>
<b>Jumlah</b>	<u><u>14.750.043.000</u></u>	<u><u>1.593.284.112</u></u>

DPP Partai Gerindra telah menggunakan Bantuan Partai Politik (Banparpol) dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar 92,83% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**15. BEBAN KEGIATAN DPP**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)	1.000.000.000	-
Beban HUT Gerindra	-	350.000.000
Beban Pengarahan Dewan Pembina	-	218.000.000
Beban Buka Puasa Bersama	-	200.000.000
Verifikasi KPU	-	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<u><u>1.000.000.000</u></u>	<u><u>773.000.000</u></u>

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**16. BEBAN PROGRAM BIDANG**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban Bidang Kesehatan	5.176.588	-
Beban Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	600.000	-
Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)	-	3.437.800.000
<b>Jumlah</b>	<u>5.776.588</u>	<u>3.437.800.000</u>

**Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)**

Akun ini merupakan beban atas pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk kader-kader Gerindra Masa Depan (GMD) yang dilaksanakan di Hambalang Bogor Jawa Barat.

**17. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kesehatan Indonesia Raya (Kesira)	346.381.300	247.601.000
Perempuan Indonesia Raya (Pira))	30.000.000	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<u>376.381.300</u>	<u>262.601.000</u>

**18. BEBAN KAMPANYE**

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan menghadapi Pemilu 2019/2024, dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.389.942.500.

**19 BEBAN BAKTI SOSIAL**

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sumbangan masyarakat	105.500.000	90.683.351
<b>Jumlah</b>	<u>105.500.000</u>	<u>90.683.351</u>

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**20. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban jasa artis	3.000.000.000	-
Beban Master Influencer	369.100.000	70.000.000
Maintenance Website	50.000.000	191.810.000
Media center dan team online	19.772.800	-
Atribut partai	5.750.000	305.520.000
Langganan majalah dan koran	5.090.000	8.590.000
Beban Hukum dan Publikasi	2.600.000	-
<b>Jumlah</b>	<u>3.452.312.800</u>	<u>575.920.000</u>

**Beban Jasa Artis**

Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 30 November 2018 antara Partai Gerindra dengan Band Nissa Sabyan, yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jasa artis, yang juga menyebutkan pihak Band Nissa Sabyan bersedia untuk menjadi artis pengisi acara dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Pilpres 2019. Jangka waktu perjanjian mulai tanggal 30 November 2018 - 30 April 2019 dengan jumlah honorarium sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 merupakan uang muka atas perjanjian tersebut.

**Atribut partai**

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

**Iklan media cetak & massa**

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa.

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**  
**(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

**21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban operasional	24.649.976.515	30.311.487.009
Gaji dan tunjangan	3.468.330.500	3.236.605.682
Beban transportasi dan perjalanan dinas	788.624.909	618.831.172
Beban jamuan	679.417.058	172.260.265
Beban penyusutan aset tetap	425.124.298	410.613.817
Beban kebutuhan kantor	388.927.600	294.945.362
Pajak Bumi dan Bangunan	381.778.437	603.889.137
Beban pemeliharaan	151.691.736	115.692.650
Beban konsumsi	92.623.500	140.525.000
Beban rumah tangga	87.296.882	714.841.088
Listrik, telepon dan internet	73.006.476	273.988.733
Beban BPJS	60.950.252	50.355.444
Beban jasa profesional	38.500.000	38.500.000
Beban jasa keamanan dan kebersihan	29.561.500	12.950.000
Alat tulis kantor	19.728.224	38.060.100
Beban inventaris dan instalasi kantor	8.855.450	67.534.650
Beban pajak PPh Pasal 21	6.156.500	25.043.844
Beban rapat internal Pengurus	4.926.096	1.492.759
Biaya pengiriman barang	2.442.500	134.702.940
Beban iuran Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)	-	3.480.000.000
Perizinan, Hukum dan Advokasi	-	5.926.900
Lain-lain	43.434.676	168.017.374
<b>Jumlah</b>	<u>31.401.353.109</u>	<u>40.916.263.926</u>

**Beban Operasional**

Akun ini terdiri dari :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beban operasional Sekretariat	13.417.314.015	8.694.977.009
Beban operasional DPD dan DPC	8.706.750.000	21.133.260.000
Beban operasional Tim Online	2.064.650.000	393.250.000
Beban operasional Bendahara	446.262.500	-
Beban operasional Server	15.000.000	90.000.000
<b>Jumlah</b>	<u>24.649.976.515</u>	<u>30.311.487.009</u>

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
(ORGANISASI NIRLABA)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI - *lanjutan***

**Beban operasional DPD dan DPC**

Akun ini merupakan beban operasional Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang yang dananya dari iuran bulanan anggota Dewan-Dewan Daerah setelah dipotong untuk iuran Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) dan Dewan Perwakilan Pusat. (*lihat catatan 9*)

**Beban Iuran Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)**

Akun ini merupakan iuran Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang setiap bulan sebesar Rp. 500.000 per anggota yang disetor DPP ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Tahun 2018 iuran DPD dan DPC tidak dipotong lagi untuk Koperasi Garudayaksa Nusantara.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 nihil, dikarenakan mulai tahun 2018 iuran yang diterima dari anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tidak lagi dipotong untuk Koperasi Garudayaksa Nusantara. Untuk tahun 2018 sebesar Rp. 3.480.000.000. *Lihat catatan 9*

**22. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 126.117.456 dan 18.345.809.

**23. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang diselesaikan pada tanggal 25 November 2020.